

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU Perpajakan No. 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548 Tahun 2000 pada Pasal 1 menjelaskan bahwasanya bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mulai 1 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak telah menghapus Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bendahara pemerintah melalui SE-12/PJ/2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenahan Administrasi NPWP Instansi Pemerintah/Bendahara. Kewajiban perpajakan bendahara pemerintah akan digantikan oleh instansi pemerintahan.

Bendahara suatu instansi pemerintah memiliki kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas belanja pegawai, belanja barang dan/atau modal, serta belanja jasa. Pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara instansi pemerintah tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan jenjang pendidikan formal di Indonesia setara sekolah menengah pertama yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Tempat ini bertujuan memberikan bimbingan akhlak dan agama, pendidikan akademik dan non-akademik serta bimbingan sosial antar warga sekolah. Dalam memaksimalkan pelaksanaan tujuan tersebut, maka madrasah memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan serta tenaga pengajar yang berkompeten guna mendukung keberhasilan proses belajar.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta yang berada di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam ilmu berdasarkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut perlu didukung adanya fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar, sehingga terjadi pengeluaran dalam proses belanja dari pihak sekolah. Proses belanja ini melibatkan utang pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendaharawan sekolah sehingga menarik perhatian penulis untuk mengetahui dan meninjau

bagaimana pelaksanaan perpajakannya serta penulis berencana menyusun KTTA berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARA MTS NEGERI 6 JAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta?
3. Apakah sudah sesuai pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak oleh bendahara di MTs Negeri 6 Jakarta?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta.
3. Mencermati kesesuaian pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak oleh bendahara di MTs Negeri 6 Jakarta.

4. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis akan melakukan peninjauan atas mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta tepatnya pada tahun 2021 dan sumber dana yang didapatkan. Penulis juga akan meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan apakah sudah sesuai antara praktik dan aturan mengenai pemotongan, pemungutan, dan penyetoran oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta pada tahun 2021. Kewajiban perpajakan yang akan ditinjau terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta. Selain itu penulis juga akan meninjau kendala yang dihadapi oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan kedepannya mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan bagi penulis dengan membandingkan praktik dan teori yang dipelajari selama kuliah.
2. Karya Tulis Tugas Akhir ini nantinya dapat dijadikan bahan bacaan dan sumber referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan.
3. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca dalam bidang perpajakan yang dilaksanakan di sekolah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini akan menunjukkan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir penulis. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori yang menjadi landasan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Teori yang digunakan bersifat umum dan khusus melalui berbagai sumber antara lain, jurnal, buku dan beberapa pengertian umum menurut beberapa ahli yang relevan dengan pembahasan, yaitu perpajakan di sekolah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai MTs Negeri 6 Jakarta yang terdiri dari profil singkat, visi, misi, struktur organisasi, anggaran BOS yang dialokasikan dan data lainnya terkait pelaksanaan perpajakan oleh MTs Negeri 6 Jakarta. Selain tentang objek penelitian, penulis akan memaparkan hasil tinjauan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh MTs Negeri 6 Jakarta selama tahun 2021. Lalu, penulis juga akan membahas hasil tinjauan pelaksanaan perpajakan dan kendala yang dihadapi oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta. Penulisan yang diterapkan adalah hasil perbandingan antara peraturan yang berlaku dengan praktik di lapangan disertai teori yang mendukung.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memaparkan simpulan atas tinjauan kewajiban perpajakan oleh Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta dan saran yang relevan terkait pembahasan penelitian Karya Tulis Tugas Akhir ini.